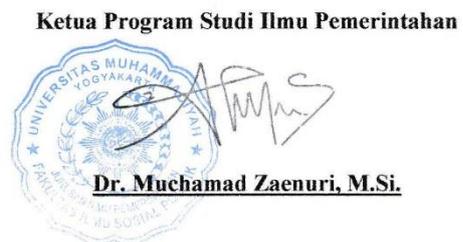


NASKAH PUBLIKASI

**DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP PELAYANAN PUBLIK
DI KECAMATAN SEBATIK TENGAH**



Angga Faris Saputra_20140520091_Dampak Pemekaran Wilayah

Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan Sebatik Tengah

Angga Faris Saputra

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Angga.faris.2014@fisipol.umy.ac.id

ABSTRAK

Indonesia pada awal kemerdekaan hingga saat ini memprioritas pembangunan sebagai tolak ukur kemajuan negara. Dalam prosesnya pembangunan banyak mengalami kendala salah satunya ialah kurang meratanya pembangunan itu sendiri. Pembangunan masih terfokus pada sentral pemerintahan saja yaitu pulau jawa sedangkan di pulau yang lainnya masih banyak ketimpangan yang terjadi. Untuk itu pada awal tahun 2001 muncullah gagasan pemekaran wilayah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan yang terjadi, hingga saat ini banyak daerah yang ingin memekarkan diri menjadi wilayah baru. Namun apakah pemekaran wilayah yang dianggap sebagai solusi masalah pembangunan benar-benar efektif atau akan hanya menimbulkan kepentingan politik baru. Beberapa wilayah berhasil memekarkan diri menjadi wilayah baru namun tidak sedikit juga yang gagal membawa daerah mereka menjadi lebih baik. Adapun faktor yang mengakibatkan wilayah baru gagal lebih baik karena belum siapnya sumber daya manusia dan adanya kepentingan politik yang tidak berorientasi pada masyarakat. Berberda dengan pulau Sebatik yang berhasil memekarkan diri menjadi nenerapa wilayah baru salah satunya ialah Kecamatan Sebatik Tengah. Dalam kurun waktu lima tahun Kecamatan Sebatik Tengah mengalami penigkatan jumlah sarana dan prasaran terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Adanya peningkatan perbaikan darana dan prasarana di Kecamatan Sebatik Tengah juga berdampak pada pelayanan publiknya. Walaupun tidak berbanding lurus dengan sarana dan prasarana namun peningkatan pelayanan itu ada. Diharapkan juga kedepannya dampak dari pemekran wilayah di Kecamatan Sebatik Tengah ini bisa lebih baik lagi seiring dengan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana yang ada.

Kata kunci: *Pemekaran wilayah, Pembangunan, Pelayanan publik.*

Angga Faris Saputra_20140520091_Dampak Pemekaran Wilayah

Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan Sebatik Tengah

Angga Faris Saputra

Student of Government Science Faculty of Social and Political Science

Muhammadiyah University of Yogyakarta, Indonesia

Angga.faris.2014@fisipol.umy.ac.id

ABSTRACT

Since the beginning of independence until today, Indonesia has been prioritizing development as a benchmark for the country's progress. During the process, development faces many obstacles, one of them is the lack of equitable development. The development is still focused on the central government, namely Java island, while on the other islands there are still many inequalities that occur. Thus, in the beginning of 2001, the idea of regional expansion emerged to overcome the development inequality that occurred. Until today, many regions in the country want to be divided into new territories. However, the division of the region that is considered as a solution to the development problem is still being questioned, whether it is truly effective or will it only give rise to new political interests. Some regions succeeded in splitting themselves into new territories but many of them also failed to bring their regions to a better level. The factors that caused failure is unpreparedness of human resources and the existence of political interests that are not based on community oriented. Different from Sebatik island which succeeded in splitting into a new territory, one of them is Sebatik Tengah District. Within five years, Sebatik Tengah District experienced an increase in the number of facilities and infrastructure, especially in the fields of education, health and infrastructure. The increase of facilities and infrastructure improvement in the Sebatik Tengah District also has an impact on public services. Although it is not directly proportional to the facilities and infrastructure, however, there is an increase in the field of service. It is also expected that in the future, the impact of regional expansion in the Sebatik Tengah District can be better along with the development of existing facilities and infrastructure.

Keyword: Area Expansion, Development, Public Service.

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu Negara yang memperoleh kemerdekaannya dari kerja keras dengan mempertaruhkan tumpah darah para leluhur bangsa. Perjuangan untuk membebaskan bangsa dari keterpurukan akibat penjajahan dari bangsa lain dapat tercapai, hal ini ditandai dengan proklamasi pada 17 Agustus 1945. Terdapat harapan dan cita-cita luhur dalam memperjuangkan kemerdekaan Negara Republik Indonesia demi generasi mendatang. Cita-cita dan harapan bangsa digunakan sebagai pedoman dasar untuk membangun Indonesia kearah yang lebih baik. Pembangunan nasional bertujuan untuk mengatur dan mensamaratakan fokus tujuan semua bidang kehidupan sebagaimana yang dibutuhkan Bangsa dan Negara Republik Indonesia dalam menjalankan kehidupan untuk mencapai kesejahteraan. Sehingga berkembangnya suatu bangsa mengarah pada tujuan yang jelas dan demi kepentingan bangsa bukan pada golongan tertentu. Pemimpin Negara memiliki perananan penting dalam mengatur arah pembangunan nasional agar sejalan dengan UUD 1945 dan Pancasila.

Pada masa kepresidenan Joko Widodo yang dimulai pada tahun 2014. Joko Widodo mengusung 9 agenda prioritas dalam pembangunan nasional yang disebut dengan Nawacita. Salah satu agenda prioritas pembangunan nasional yang tertuang pada poin ke-tiga nawacita ialah Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Adapun maksud dari poin ke-tiga ini ialah membangun Indonesia dari wilayah perbatasan yang merupakan wilayah terluar dari Indonesia. Mengapa pembangunan dari wilayah perbatasan penting? Ini dikarenakan wilayah perbatasan merupakan wilayah Indonesia yang langsung berbatasan dengan negara lain. Secara tidak langsung wajah perbatasan merupakan wajah Indonesia di mata Negara negara lain.

Wilayah perbatasan Kalimantan Utara memiliki arti yang sangat penting baik secara ekonomi, geo-politik, dan pertahanan keamanan karena berbatasan langsung dengan wilayah negara tetangga (Sabah dan Serawak) Malaysia yang memiliki tingkat perekonomian relatif lebih baik. Potensi sumber daya alam yang dimiliki di wilayah ini cukup melimpah, namun hingga saat ini relatif belum dimanfaatkan secara optimal. Di sisi lain, terdapat berbagai persoalan yang mendesak untuk ditangani karena besarnya dampak dan kerugian yang dapat ditimbulkan. Ketertinggalan secara ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat perbatasan Kalimantan Utara juga dipicu oleh minimnya infrastruktur dan aksesibilitas yang tidak memadai, seperti jaringan jalan dan angkutan perhubungan darat maupun sungai masih sangat terbatas, prasarana dan sarana komunikasi seperti pemancar atau transmisi radio dan televisi serta sarana telepon relatif minim, ketersediaan sarana dasar sosial dan ekonomi seperti pusat kesehatan masyarakat, sekolah, dan pasar juga sangat terbatas. Kondisi keterbatasan tersebut akan semakin nyata dirasakan oleh masyarakat perbatasan ketika mereka membandingkan dengan kondisi pembangunan di negara tetangga Malaysia.

Daerah perbatasan merupakan wilayah strategis sekaligus daerah rawan terkait dengan masalah-masalah pertahanan dan keamanan negara. Oleh karenanya sangat perlu untuk mendapatkan perhatian yang lebih besar khususnya yang menyangkut pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi produktif masyarakat dan keamanan. Selama ini daerah perbatasan masih identik dengan daerah yang terisolir, terpencil, terbelakang dalam berbagai macam aspek kegiatan baik sosial, ekonomi, budaya, serta pertahanan dan keamanan.

Pulau Sebatik merupakan salah satu dari 92 pulau kecil terluar yang terletak di Provinsi Kalimantan Utara dan berbatasan langsung dengan negara tetangga, Malaysia. Pada awalnya, Pulau Sebatik adalah bagian dari Kabupaten Nunukan, kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1996 yang menyatakan bahwa wilayah Sebatik berubah menjadi kecamatan dan sejak 2006, sesuai Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 yang menyatakan pemekaran Kecamatan Sebatik menjadi dua wilayah, yaitu Kecamatan Sebatik dan Kecamatan Sebatik Barat. Seiring dengan diberlakukannya sistem desentralisasi, pada tahun 2011, wilayah Sebatik dimekarkan kembali menjadi lima kecamatan, yaitu Kecamatan Sebatik, Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebatik Timur, Kecamatan Sebatik Utara, dan Kecamatan Sebatik Tengah. Letak strategis yang berada di perbatasan Indonesia dan Malaysia serta potensi sumber daya alam yang melimpah menjadikan Pulau Sebatik sebagai wilayah strategis lintas negara. Namun, dibalik beragam potensi yang dimilikinya, Pulau Sebatik memiliki berbagai persoalan, terutama dalam pengelolaan pembangunan dan peningkatan ketahanan sosial serta pelayanan publik di wilayah tersebut. Tak terkecuali dengan Kecamatan Sebatik Tengah yang merupakan salah satu hasil dari pemekaran wilayah pada tahun 2011.

Kecamatan Sebatik Tengah masih memiliki masalah dalam pengelolaan pembangunan wilayahnya seperti susah akses jalan menuju Sebatik Tengah, fasilitas kesehatan dan pendidikan yang belum memadai, hingga geliat perekonomian warga yang bergantung dengan negara tetangga. Akses jalan menuju Sebatik Tengah masih susah karena wilayah Sebatik Tengah merupakan wilayah perbukitan dengan kontur tanah yang bergerak. Sehingga pembangunan akses jalan masih terhambat. Sedangkan untuk fasilitas kesehatan hanya ada satu puskesmas pembantu di Desa Aji Kuning yang menjadi satu satunya rujukan masyarakat ketika sakit. Sedangkan untuk akses pendidikan sendiri belum memadai karena dari ke empat desa yaitu Desa Aji Kuning, Desa Bukit Harapan, Desa Maspul, dan Desa Sei Limau dari ke empat desa tersebut hanya Desa Maspul yang belum yang belum mempunyai Sekolah dasar, sehingga anak di desa Maspul harus ke desa tetangga untuk menempuh pendidikan dasarnya. Sedangkan untuk sekolah menengah pertama dan menengah atas masih dalam bentuk satu atap. Dalam sisi perekonomian masyarakat Sebatik bergantung dengan negara tetangga, karena di wilayah Sebatik Tengah terdapat jalur keluar masuknya barang dari dan menuju Malaysia. Sehingga nilai tukar yang digunakan ialah Ringgit Malaysia, hal ini sangat merugikan warga Sebatik Tengah sendiri.

2. Kerangka Teori

Pemberlakuan Otonomi Daerah yang dimulai sejak tanggal 1 Januari 2001 telah membawa implikasi yang luas dan serius. Otonomi daerah merupakan fenomena politis yang menjadikan penyelenggaraan Pemerintahan yang sentralistik-birokratis ke arah desentralistik-partisipatoris. UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan direvisi menjadi UU No.32 Tahun 2004 telah melahirkan paradigma baru dalam pelaksanaan otonomi daerah, yang meletakkan otonomi penuh, luas dan bertanggung jawab pada daerah kabupaten dan kota.

Perubahan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan masyarakat, menumbuhkan semangat demokratisasi dan pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan, dan lebih jauh diharapkan akan menjamin tercapainya keseimbangan kewenangan dan tanggung jawab antara pusat dan daerah. Lahirnya Undang-undang ini juga akan memberikan implikasi positif bagi dinamika aspirasi masyarakat setempat. Kebijakan daerah tidak lagi bersifat “given” dan “uniform” (selalu menerima dan seragam) dari pemerintah pusat, namun justru pemerintah daerah yang mesti mengambil inisiatif dalam merumuskan kebijakan daerah yang sesuai dengan aspirasi, potensi dan sosiokultural masyarakat setempat. Undang-undang ini juga membuka jalan bagi terselenggaranya pemerintahan yang baik (good governance) di satu pihak dan pemberdayaan ekonomi rakyat di pihak lain. Karena dengan otonomi, pemerintahan kabupaten/ kota memiliki kewenangan yang memadai untuk mengembangkan program-program pembangunan berbasis masyarakat (ekonomi rakyat).

3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif yang menjabarkan nilai variabel mandiri, baik satu variabel tanpa membuat perbandingan. Menurut Moleong (2016:6), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memahami kejadian/peristiwa yang dialami oleh subjek penelitian yang meliputi perilaku, persepsi, motivasi serta tindakan – tindakan yang disusun dalam bentuk deskripsi. Subjek penelitian ini adalah satu tahun periode Camat Sebatik Tengah dari tahun 2011-2016.

4. Pembahasan dan Analisis

4.1 Kebijakan Pemekaran Wilayah di Kecamatan Sebatik Tengah

Sebatik Tengah adalah salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia. Wilayah Sebatik Tengah merupakan hasil pemekaran dari kecamatan Sebatik yang disahkan oleh DPRD Nunukan melalui Peraturan Daerah (Perda) pada tanggal 10 Agustus 2011. Sebelumnya kecamatan Sebatik Tengah masih tergabung dalam wilayah administrasi kecamatan Sebatik, awalnya pada tahun 2009 mulai adanya inisiasi untuk melakukan pemekaran wilayah

Sebatik sendiri. Pemekaran wilayah sendiri meliputi seluruh wilayah pulau Sebatik hal ini disebabkan karena pada saat itu pulau Sebatik hanya terdiri dari dua kecamatan saja yaitu, kecamatan Sebatik dan kecamatan Sebatik Barat. Pada tahun 2011 pulau sebatik mekar menjadi 5 kecamatan yaitu: Kecamatan Sebatik, kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebatik Timur, Kecamatan Sebatik Utara dan Kecamatan Sebatik Tengan itu sendiri.

Pemekaran wilayah ini dilakukan karena adanya ketimpangan sosial yang terjadi sehingga hal ini pula yang menjadikan pelayanan publik di pulau Sebatik kurang baik. Karena ada sekitar 25 ribu jiwa yang berpenghuni di Sebatik ini, sehingga jika hanya di bawahi dengan 2 kecamatan saja pelayanan publik yang diberikan dirasa masih kurang. Hal lain yang menjadi pertimbangan ialah faktor wilayah dimana kontur tanah di Sebatik sendiri berbukit-bukit, yang menjadikannya sulit untuk di akses. Selain itu juga banyak fasilitas yang terbengkalai karena wilayah tersebut berada jauh dengan pusat pemerintah kecamatan. Pemekaran wilayah ini juga didasarkan pada keinginan untuk bisa mendapatkan pelayanan publik yang terbaik. Alasan lain yang mendorong adanya pemekaran ini ialah untuk pemanfaatan sumberdaya alam agar bisa di optimalkan. Jika wilayah Sebatik mampu berdiakri secara pasar dan ekonomi maka akan mudah bagi Sebatik untuk melakukan transaksi pasar kedalam negeri sehingga tidak lagi melakukannya lagi dengan Malaysia yang secara nyata Sebatik selalu dirugikan dengan transaksi pasar tersebut.

Sehingga dengan adanya kebijakan pemekaran ini mampu mendorong kecamatan Sebatik Tengah untuk bisa ikut berkontribusi menjadikan pulau Sebatik berdikari atas negara tetangga.

4.2 Pelayanan Publik di Kecamatan Sebatik Tengah

Pemerintah daerah yang baik bisa dilihat dari penyelenggaraan pelayanan publik yang ada, tak terkecuali di Kecamatan Sebatik Tengah. Dahulu sebelum Sebatik memekarkan diri menjadi lima kecamatan, akses pelayanan publik terutama di wilayah sebatik tengah masih kurang layak, seperti akses pendidikan dan kesehatan. untuk pendidikan sendiri wilayah kecamatan sebatik tengah yang terdiri dari empat desa masih ada 1 desa yang belum memiliki sekolah dasar. Sedangkan jarak dari tempat tinggal siswa itu sangat berjauhan dengan sekolah mereka. Untuk sekolah menengah pertama kecamatan sebatik tengah memiliki satu unit sekolah dan satu unit sekolah menengah atas yang masih menjadi satu atap dengan sekolah menengah pertama

tersebut. Hal ini menyebabkan pergantian penggunaan ruang kelas untuk sekolah menengah pertama pada pagi hari dan sore untuk sekolah menengah atas. Akses yang jauh membuat pendidikan di wilayah ini sangat tertinggal. Terkadang kehadiran mereka di sekolah saja sudah sangat berharga bagi guru-guru mereka.

Sedangkan untuk akses kesehatan sendiri dipulau sebatik dibantu oleh puskesmas pembantu yang sebelum dimekarkan hanya ada di kecamatan Sebatik Barat dan Sebatik. Untuk wilayah sebatik Tengah sendiri yang kala itu masih belum memiliki puskesmas dengan jarak yang dekat. Jika warga ingin melakukan pengobatan terkadang mereka menggunakan jasa orang pintar baru jika sudah dibutuhkan perawatan medis mereka memilih berobat ke tawau dari pada ke nunukan. Hal ini pun mereka lakukan karena akses jalan yang tersedia sendiri dari wilayah kecamatan Sebatik Tengah masih tanah ditambah jika musim hujan maka susah lagi untuk bisa dilewati. Sedangkan akses jalan yang susah sering menghambat masyarakat untuk mengurus administrasi yang letaknya juga cukup jauh. Akses jalan yang sudah di aspal hanya jalur lingkaran sebatik saja, itupun untuk kondisi di Sebatik Tengah rusak dan berlobang. Dimana akses jalan ini sangat penting bagi masyarakat untuk kegiatan mereka baik sosial maupun ekonomi.

Aspek yang cukup penting juga ialah pelayanan listrik yang disediakan pemerintah, untuk listrik sendiri masyarakat sebatik masih tergantung pada pembangkit listrik tenaga diesel dan pembangkit listrik tenaga surya. Kapasitas listrik yang dihasilkan sendiri masih kecil dan harus dibagi dengan jumlah rumah yang ada. Sehingga daya listrik hanya bertahan 2-3 jam dari jam 6 hingga jam 9 malam. Adapun imbas dari kurangnya listrik di wilayah Sebatik tengah ini mengakibatkan gelapnya wilayah perbatasan di utara negeri ini. tak hanya itu untuk akses perpindahan warga sebatik sendiri masih mengandalkan kendaraan pribadi atau menumpang truck pabrik sawit. Karena akses transportasi publik belum tersedia disini. Hal ini jugalah yang menjadikan sering lamanya proses administrasi di wilayah Sebatik Tengah ini.

4.3 Dampak pemekaran terhadap pelayanan publik di kecamatan sebatik tengah

Dampak yang baik merupakan hasil yang selalu diharapkan oleh masyarakat dan pemerintah yang sedang melakukan proses pemekaran daerah. Jika sudah siap maka proses pemekaran tidaklah menjadi kendala yang berarti, namun jika belum adanya persiapan yang matang maka pemekaran wilayah ini sendiri akan menjadi masalah bagi daerah tersebut. Ada daerah yang langsung berdiakri baik secara *financial* atau *non financial*, ataupun sebaliknya. Tak berbeda dengan kecamatan Sebatik Tengah

setelah resmi menjadi kecamatan baru pada agustus 2011, pada saat itu camat Sebatik Tengah dijabat oleh bapak Harman, S.IP perlahan tapi pasti perkembangan Sebatik Tengah tidak bisa di anggap biasa saja. Hal ini dilihat dari pembangun kecamatan sebatik tengah sendiri dalam kurun waktu 5 tahun kepemimpinannya. Camat Sebatik tengah ini bisa memperjuangkan jalan yang layak berupa jalan beton. Perjuangan pengadaan jalan beton ini pun tidak mudah camat sebatik tengah di dukung oleh perangkat desa mengadakan festival makan durian terpanjang yang mengundang para pejabat. Pada saat festival inilah camat sebatik tengah beserta warga melakukan audiensi kepada pemerintah kabupaten dan provinsi.

Akses jalan ini sangat penting bagi masyarakat sebatik tengah karena untuk menghubungkan dengan fasilitas pendidikan dan kesehatan itu sendiri. Karena lokasi sekolah dasar yang begitu jauh dengan rumah penduduk seperti di Desa Maspul itu harus ke Desa sebelah untuk bisa bersekolah jadi akses jalan yang bagus pun tetap dinanti. Karena sebelum dulu jalan di beton banyak perjuangan anak-anak menempuh sekolah yang harus menembus terjalnya jalan dan terkadangpun menyebarangi genangan banjir. Untuk akses pendidikan pada tingkat sekolah menengah pertama sendiri sudah banyak mengalami perkembangan dan pembangunan. Penambahan jumlah unit sekolah pun menjadi prioritas ketika kecamatan ini memekarkan diri menjadi kecamatan baru. Pada awal pemekaran sendiri sekolah menengah pertam di kecamatan sebatik tengah ini bertambah satu unit yang berada di Desa Bukit Harapan. Sedangkan untuk penambahan sekolah menengah atas itu berada di desa Aji Kuning yang menjadi satu atap dengan Sekolah menengah pertamanya.

Seiring berjalannya waktu dan perkembanganpun mulai diberdayakan kembali. Pada tahun 2014 perkembangan fasilitas berikutnya ialah pembangunan gedung sekolah di sekolah menengah pertama 002 di desa Bukit Harapan dan Sekolah menengah atas di desa Sungai Limau. Upaya pembangunan gedung sekolah dan pemisahan sekolah yang masih satu atap ini agar siswa dan siswi bisa belajar di pagi hari dan lebih banyak waktu belajar disekolah. Ditambah juga adanya transportasi bagi siswa-siswi berupa bus dan truk pengangkut anak sekolah.

Untuk melihat segi kualitas pendidikan yang ada di Kecamatan Sebatik Tengah dengan berdasarkan dari hasil observasi pada tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah. rata-rata memiliki jumlah siswa dan jumlah guru yang tersedia pada tabel di bawah.

No.	Nama Sekolah	Jumlah Siswa	Jumlah Guru
1.	SDN 001 Sebatik Tengah	117 Siswa	10 Guru
2.	SDN 002 Sebatik Tengah	57 Siswa	6 Guru
3.	SDN 003 Sebatik Tengah	105 Siswa	9 Guru
4.	SDN 004 Sebatik Tengah	80 Siswa	9 Guru
5.	SDN 005 Sebatik Tengah	92 Siswa	10 Guru
6.	SDN 006 Sebatik Tengah	89 Siswa	10 Guru
7.	SMPN 001 Sebatik Tengah	240 Siswa	20 Guru
8.	SMPN 002 Sebatik Tengah	188 Siswa	18 Guru
9.	SMAN 001 Sebatik Tengah	356 Siswa	27 Guru

Tabel 3.1 Perbandingan jumlah siswa dan guru di Sebatik Tengah

Dari tabel diatas perbandingan jumlah guru dan siswa menurut Peraturan Pemerintah No.74 Tahun 2008 tentang guru pasal 17 bisa dikatakan ideal dari segi jumlah. Tidak ada yang kelebihan dan kekurangan guru. Namun melihat segi kualitas dari konsentrasi guru untuk sekolah di kecamatan Sebatik Tengah Sendiri bisa di katakan kekurangan karena di temukan pada lapangan bahwa untuk 1 guru bisa mengampu lebih dari satu mata pelajaran. Namun demikian sudah adanya proses pengajuan untuk penambahan guru bersertifikasi.

Untuk tahun 2013 sendiri camat sebatik tengah berhasil menambah daya listrik di desa Bukit Harapan dengan meresmikan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) komunal di desa Bukit Harapan. Penambahan daya listrik ini diharapkan mampu memerangi gelapnya sebatik pada malam hari. Hingga akhir kepemimpinan bpk Herman untuk 3 desa di kecamatan sebatik tengah yaitu Desa Aji Kuning, Desa Maspul dan Desa Sungai Limau sudah teraliri listrik dari PLN. Namun untuk Desa Bukit Harapan sampai saat ini masih keterbatasan akan listrik karena wilayahnya berada paling ujung kecamatan sebatik tengah. Namun direncanakan pada akhir 2017 Perusahaan Listrik Negara akan menambah jaringan listrik di desa Bukit Harapan.

Sedangkan untuk aspek kesehatan sendiri Kecamatan Sebatik Tengah sudah memiliki Puskesmas induk yang terinstalasi dengan IGD. Jadi ketika warga sebatik tengah yang berjumlah sekitar 8000 jiwa ini sakit sudah tidak perlu jauh-jauh untuk pertolongan penanganan pertama. Berbeda dengan dahulu yang mereka masih mengandalkan orang pintar karena akses kesehatan yang jauh ditambah dengan jalan tanah merah yang kalau hujan sudah untuk dilewati. Untuk pelayanan kesehatannya

sendiri didukung oleh 3 dokter umum, 1 dokter ahli gizi, dibantu oleh tenaga medis lainnya. sehingga rujukan pertolongan pertama sudah bisa dilakukan di puskesmas sebatik tengah ini. Selain itu untuk mengedukasi tentang kesehatan warga Kecamatan Sebatik Tengah dibantu dengan adanya posyandu pembantu. Terhitung mulai pada tahun 2012 posyandu pembantu itu ada 11 anmun seiring berjalannya waktu adanya jumlah pengurangan posyandu. Hingga 2017 ini hanya ada 9 posyandu pembantu di ke empat desa yang ada di kecamatan Sebatik Tengah ini. Hal ini disebabkan karena akses jalan yang sudah baik sehingga ada bebearapa posyandu yang dijadikan satu agar lebih efektif dan efisien. Berikut jumlah perubahan fasilitas kesehatan di Kecamatan Sebatik Tengah sendiri.

Dari Puskesmas Induk sendiri dibantu oleh 2 dokter umum, 4 perawat dan 1 tenaga bidan. Melihat dari kondisi lapangan puskesmas induk ini adanya kesiagaan dari dokternya bergantian jaga. Jadi selama puskesmas buka dokter selalu ada, walaupun dalam keadaan seharusnya sangat kurang. Dengan melihat kondisi Sebatik Tengah yang baru mekar dan berada di wilayah perbatasan sudah cukup membantu walaupun dengan kendala-kendalanya.

Dari segi urusan adinistrasi kecamatanpun kecamatan sebatik tengah sudah berjalan cukup baik selain sudah adanya kantor kecamatan yang terletak di Desa Maspul. Kantor kecamatan sebatik sendiri memiliki motto pelayanan PATOK PATEN yang dijadikan pegangan oleh aparatur sipil negara untuk melayani warga Sebati Tengah. Dari hasil wawancara dengan salah seorang warga di sebatik tengah yaitu Sabahrudin selaku salah satu bagian BPD Desa Maspul pelayanan yang diberikan oleh kecamatan sudah cukup baik dibanding dulu. Karena selain aksesnya yang sudah baik dan dekat respon dari pihak kecamatan sendiripun cukup baik dan cepat. Disebutkan juag bahwa tagline pelayanan PATOK PATEN ini sendiri yang memberikan semangat berprestasi kepala camat pada periode lalu yaitu bpk. Herman S.IP.

5. Daftar Pustaka

- Abidin, Said Zainal. 2004. Kebijakan Publik. Jakarta Pancar Siwah.
- Bratakusumah, S.D. 2004. Perencanaan Pembangunan Daerah. Jakarta: Gramedia
- Dedi Febriyandi. 2015. Proses Perumusan Kebijakan Pemekaran Daerah: Studi Kasus Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara. Jurnal Politik Profetik Vol. 3, No. 2.
- Fakhry Ghafur. 2016. Ketahanan Sosial Masyarakat di Perbatasan: Studi Kasus di Pulau Sebatik. Jurnal Masyarakat Indonesia Vol.42, No.2. <http://jdih.sumselprov.go.id/userfiles/makalah/Makalah%20Otonomi%20Daerah%20dan%20Pemekaran%20Wilayah.pdf.pdf> diakses pada tanggal 22 februari 2018 pukul 23.24 wib
- <http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/MAPU5301M1.pdf> diakses pada tanggal 20 februari 2018 pukul 22.33 wib.
- <http://repository.usu.ac.id> diakses pada tanggal 20 februari 2018 pukul 20.07 wib
- <http://repository.ung.ac.id> diakses pada tanggal 20 februari 2018 pukul 21.00 wib
- Khairullah dan Malik Cahyadin. 2006. Evaluasi Pemekaran Wilayah di Indonesia: Studi Kasus Kabupaten Lahat. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 11 Hal: 261-177.
- Koesnaedi, Hery. 2014. *Menulis Skripsi, Tesis & Disertasi*. Yogyakarta : Araska.

- Parsons, Wayne. 2006. Public Policy: Pentgantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Dialihbahasakan oleh Tri Wibowo Budi Santoso. Jakarta:Kencana.
- Prasodjo, Eko. 2006. Rekonstruksi Ulang Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Indonesia: Antara Sentripetalisme dan Sentripugalisme. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Ilmu Administrasi Publik, FISIP UI. Jakarta.
- Said, M. Mas'ud. 2005. Arah Baru Otonomi Daerah Di Indonesia. UMM Press, Malang.
- Sudjarwo. 2001. Metodologi Penelitian Sosial. Bandung: Mandar Maju.
- Tarigan, R. 2005. Perencanaan Pembangunan Wilayah. Jakarta: Bumi Aksara
- Winarno, B. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Khairullah dan Malik Cahyadin. 2006. Evaluasi Pemekaran Wilayah di Indonesia: Studi Kasus Kabupaten Lahat. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 11 Hal: 261-177.